

NASKAH PUBLIKASI

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta)

*FACTORS THAT AFFECTING VALUE ADDED TAX
(Case Study: Pratama Tax Service Office of Yogyakarta)*



Oleh

HARDIYANTI HAFEL

20150420335

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta)**

***FACTORS THAT AFFECTING VALUE ADDED TAX
(Case Study: Pratama Tax Service Office of Yogyakarta)***

Diajukan oleh

**HARDIYANTI HAFEL
20150420335**

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 16 Maret 2019

Yang terdiri dari

Dr. Suryo Pratolo, S.E., M.Si., Ak., CA., AAP-A
Ketua Tim Penguji

Alek Murtin, SE., M.Si., Ak., CA

Anggota Tim Penguji

Sigit Arie Wibowo, S.E., M.Acc., Ak., CA

Anggota Tim Penguji

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rizal Yaya., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA

NIK. 19731218199904 143 068

FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta)

Hardiyanti Hafel

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

hardiyanthi.hafel157@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the factors that affect the Value added tax revenue, including the rupiah exchange rate, Inflation and the number of taxable entrepreneurs. This research was conducted at Tax service office of Yogyakarta with the sampling period from January 2013 to December 2017. The data were analyzed using multiple regression.

The results of this research show that inflation and the number of taxable entrepreneurs simultaneously has a positive effect on value added tax revenue. While the rupiah exchange rate doesn't have a positive effect on value added tax at the tax service office of Yogyakarta.

Keywords : *Value Added Tax revenue, the rupiah exchange rate, Inflation, the number of taxable entrepreneurs.*

I. PENDAHULUAN

Dalam menunjang pelaksanaan pemerataan pembangunan diseluruh pelosok negeri yang berlangsung terus-menerus, dibutuhkan pembiayaan/anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut dapat bersumber dari penerimaan sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu alternatif yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PBB, BPHTB, PPnBM serta Pajak lainnya (Prasetyo, 2007). Sektor pajak, yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan APBN salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa oleh orang pribadi atau badan dalam suatu daerah

pabean. Sehingga semakin tinggi konsumsi masyarakat maka penerimaan PPN semakin meningkat (Warnita dkk, 2015). PPN berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dimana tinggi rendahnya penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi berpengaruh dengan keberlangsungan negara, dalam hal ini dilihat dari tingkat konsumsi serta perputaran nilai uang dalam Negara. Untuk itu, pentingnya pengawasan pemerintah akan faktor internal dan eksternal dalam mengawasi dan mengontrol kestabilan perekonomian Negara (Renata dkk, 2016).

Faktor internal meliputi kebijakan dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro, yang berperan sebagai penggerak utama tinggi-rendahnya tingkat penerimaan pajak. Hal ini, dilihat dari pengaruh beberapa variabel ekonomi makro diantaranya inflasi dan nilai tukar rupiah (Renata dkk, 2016). Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PPN yang pertama adalah nilai tukar rupiah, dimana merupakan jumlah uang domestik yang digunakan dalam memperoleh satuan unit mata uang asing (Murni, 2006). Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada meningkatnya harga jual barang dalam negeri sehingga secara langsung memengaruhi konsumsi masyarakat. Salah satu fenomena ekonomi yang hampir dialami seluruh Negara di Dunia termasuk Indonesia adalah inflasi. Menurut Case dan Fair (2009), terjadinya inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga barang secara umum. Perubahan inflasi yang fluktuatif dapat mempengaruhi keseimbangan serta stabilitas perekonomian yang berkaitan dengan penerimaan PPN (Pratama, dkk. 2016).

Selanjutnya faktor internal dalam membantu keberlangsungan penerimaan PPN, dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan meningkatkan realisasi estimasi setiap tahun, maka diperlukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan realisasi pajak salah satunya Pajak

Pertambahan Nilai. Adanya optimalisasi ekstensifikasi pajak dapat meningkatkan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar. Menurut Renata dkk, (2016) semakin patuh PKP dalam menjalankan kewajiban PPN-nya maka semakin meningkat pula penerimaan pajak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam mencapai target penerimaan. Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan serta menjaga kestabilan aktivitas ekonomi agar realisasi penerimaan pajak maksimal sesuai dengan yang ditargetkan. Penelitian ini merupakan replikasi dengan menggunakan lokasi dan periode waktu yang berbeda untuk memberikan informasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dengan demikian, penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak memiliki pengaruh positif pada penerimaan PPN.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta dan Bank Indonesia. Menggunakan data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari *database* KPP Pratama, BPS kota Yogyakarta dan *website* resmi Bank Indonesia dengan periode pengambilan data bulanan, mulai dari Januari 2013 hingga Desember 2017, sehingga berjumlah 60 pengamatan tetapi data mengalami *outlier* sebanyak 10, maka jumlah pengamatan menjadi 50. Populasi dalam penelitian ini berupa wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Kota

Yogyakarta. Sampel penelitian, pengusaha yang jenis usahanya telah dikukuhkan sebagai PKP.

Dikarenakan bentuk data dalam penelitian berupa nilai satuan mata uang, jumlah unit serta presentase, sehingga sebelum diuji menggunakan SPSS data di transformasikan dalam bentuk logaritma natural (LN) untuk menyamaratakan jenis angka dalam data penelitian. Data variabel yang ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural yaitu, realisasi penerimaan PPN, Nilai tukar rupiah dan jumlah PKP.

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen : Pajak Pertambahan Nilai

Variabel dependen adalah variabel yang dapat memberikan reaksi atau respon apabila dihubungkan dengan variabel bebas (Sarwono, 2006). Dalam penelitian ini Penerimaan PPN digunakan sebagai variabel dependen. Data yang digunakan hanya dalam bentuk realisasi penerimaan dari PPN di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Serta, PPN terhutang dapat dihitung sebagai berikut

$$PPN \text{ (terutang)} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2. Variabel Independen

a) Nilai Tukar Rupiah : jumlah uang domestik yang digunakan dalam memperoleh suatu unit mata uang asing (Murni, 2009). Data yang digunakan berupa rata-rata fluktuasi nilai tukar rupiah dalam sebulan, selama periode 2013-2017 di BI dalam satu Rupiah (Rp/USD).

b) Inflasi : Kondisi dimana terjadi kenaikan harga secara kontinu dalam suatu periode. Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data yang digunakan berupa data bulanan dari Januari 2013 hingga Desember 2017.

- c) Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010, PKP yaitu pengusaha yang telah melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak yang telah dikenakan pajak, dan dalam peredaran/penerimaan usaha dalam satu tahun buku telah melebihi batas maksimum yaitu penerimaannya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

III. HASIL PENELITIAN

Uji Kualitas Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Bagian ini menjelaskan sampel penelitian dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi. Hasil pengujian disajikan dalam table berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	<i>Mean</i>	Std. Deviasi
PPN	60	1371896540 1	13703536573 9	36469458196,9 7	23126198698,09 4
NTKR	60	9715	14396	12485,98	1262,219
INF	60	-0.45	7,32	1,1458	1,98241
PKP	60	1073	1745	1401,75	186,295
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ada atau tidaknya distribusi data normal antara variabel independen

dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji statistik *non-parametik Kolmogorov-Smirnov* (K-S). dikatakan normal jika hasil uji $> 0,05$.

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

Model	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
1	0,730	Data Terdistribusi Normal

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

b. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari pengamatan satu dengan pengamatan lain.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman's rho*.

Hasil uji disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
NTKR	0,258	Bebas Heteroskedastisitas
INF	0,603	Bebas Heteroskedastisitas
PKP	0,675	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

c. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah ditemukan dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Regresi yang baik jika tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Dalam uji multikolinearitas pengambilan keputusan dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 maka model regresi dalam penelitian tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
NTKR	0,317	3,152	Bebas Multikolinearitas
INF	0,735	1,361	Bebas Multikolinearitas
PKP	0,354	2,823	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

d. Uji Autokolerasi

Bertujuan untuk menguji apakah regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode yang sekarang dan periode sebelumnya. Hal ini dilihat dari nilai uji *Durbin-Watson* dalam model regresi. Model bebas uji autokolerasi jika nilai $DU < DW < (4-DU)$. Hasil uji autokolerasi dalam model ini, sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokolerasi

Model	Durbin-Watson	Nilai DW (DU)	4-DU	Kesimpulan
1	1,729	1,6739	2,3261	Bebas Autokolerasi

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan PPN. Dengan menggunakan SPSS 15. Pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase variabel independen yang mampu menerangkan variabel dependen. Hal ini dilihat dari nilai R^2 jika mendakati angka 1 maka menunjukkan bahwa variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji dalam penelitian, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,536	0,506

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

2. Uji F (Simultan)

Dalam uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model penelitian. Hasil uji disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Simultan (F)

Model	Nilai F	Sig
1	17,727	0,000

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

3. Uji t (Parsial)

Tujuan digunakan uji ini adalah untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melihat dari nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas/sig masing-masing variabel independen kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial (t)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-4,337	2,825		-1,535	0,132
NTKR	1,905	0,993	0,342	1,919	0,061
INF	0,145	0,047	0,364	3,105	0,003
PKP	2,209	0,697	0,535	3,169	0,003

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2019

Dari hasil pengujian pada tabel 4.6, dinyatakan dalam bentuk persamaan model regresi sebagai berikut :

$\text{LnPPN} = 0,342 \text{ LnNTKR} + 0,364 \text{ INF} + 0,535 \text{ LnPKP} + e$

PEMBAHASAN (INTERPRETASI)

1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai uji parsial (t) sebesar $0,061 > 0,05$ yang berarti bahwa nilai tukar rupiah tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN kota Yogyakarta. Sehingga hipotesis pertama dinyatakan ditolak. Fluktuasi nilai tukar rupiah berdampak pada kenaikan harga barang dalam negeri, jika terjadi dalam jangka waktu panjang. Kenaikan harga barang tersebut tidak terjadi secara umum, hanya barang-barang tertentu. Misalnya kenaikan harga pada barang-barang yang di impor dari Negara yang memiliki harga mata uang lebih tinggi dari harga rupiah terhadap dollar. Namun, jika fluktuasi terjadi dalam jangka waktu pendek maka dapat dikatakan tidak terjadi kenaikan atas harga barang. Misalnya hanya terjadi kenaikan dalam selang waktu 24 jam atau lebih. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warnita dkk, (2016)

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai sig sebesar $0,03 < 0,05$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga pada satu atau dua barang tidak dikatakan inflasi. Inflasi berdampak pada harga jual barang dan jasa yang merupakan dasar pengenaan pajak. Sehingga semakin tinggi inflasi maka dasar pengenaan pajak akan meningkat yang demikian memicu peningkatan penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Renata dkk, (2016); Nuraeni, (2011) dan Diah Yuliana dkk, (2017) yang mana menemukan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh PKP Terhadap Penerimaan PPN

Dilihat dari nilai uji partial sebesar $0,03 < 0,05$ yang menandakan bahwa pengusaha kena pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Salah satu bentuk pengawasan pemerintah dalam mengawasi kestabilan penerimaan yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang bertujuan untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak setiap tahun.

Dengan adanya optimalisasi ekstensifikasi pajak maka dapat meningkatkan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar. Semakin banyak jumlah PKP yang terdaftar dan semakin patuh PKP dalam menghitung, melaporkan serta menyetorkan hutang pajaknya maka penerimaan PPN dapat mengalami peningkatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saepudin, (2008) ; Pratama dkk, (2016) ; Renata dkk, (2016) dan Nuareni, (2011).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, hasil ini bertolak belakang dengan perumusan hipotesis penelitian ini. Melemahnya nilai tukar rupiah tidak secara langsung dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dikarenakan, tidak bersifat jangka panjang. Hanya berselang beberapa jam atau hari nilai tukar dapat menguat kembali terhadap Dollar. Sehingga hal kondisi tersebut tidak mempengaruhi penerimaan PPN.
2. Inflasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Inflasi berdampak pada

harga jual barang dan jasa yang merupakan dasar pengenaan pajak. Sehingga semakin tinggi inflasi maka dasar pengenaan pajak akan meningkat yang demikian memicu peningkatan penerimaan PPN.

3. Jumlah PKP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah di rumuskan. Karena, semakin banyak PKP yang patuh dalam menghitung, melaporkan serta menyetorkan hutang PPN, maka dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagi pemerintah untuk dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, dengan membuat kebijakan mengenai pengurangan proses impor barang, perbanyak produksi serta menghimbau masyarakat untuk menggunakan produk hasil dalam negeri.
2. Bagi KPP Pratama Kota Yogyakarta, diusahakan untuk selalu melakukan optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi agar para pelaku usaha dapat melaporkan jenis usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, yang demikian mewajibkan mereka untuk patuh melaporkan dan menyetorkan hutang pajak sehingga penerimaan PPN semakin maksimal.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, untuk menggunakan variabel ekonomi makro lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerimaan PPN serta memperbanyak jumlah sampel yang digunakan dengan menggunakan data-data yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an* Surah At-Taubah ayat 29 dan Terjemahannya.
- Bank Indonesia. (2018). "www.bi.go.id". Diakses tanggal 29 September 2018 pk 21.00 WIB.
- Case dan Fair (2009). "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*". PT. Indeks. Jakarta.
- Ditjen Pajak. (2001). *Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/ tentang Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intesifikasi Pajak*.
- Ditjen Pajak. (2009). "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai*".
- Ditjen Pajak. (2007). "*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*".
- Ghozali, Imam (2009). "*Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indeks Harga Konsumen Kota Yogyakarta. (2018). "<https://yogyakarta.bps.go.id>". Diakses tanggal 29 Desember 2018 pk 21.00 WIB.
- Indriantoro Nur, dan Bambang Supomo (2002). "*Metodologi Penelitian Bisnis*". BPFE. Yogyakarta.
- Karlina, N. Pratomo, D. & Nurbaiti, A. (2016). "Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung tahun 2010-2015)". *Jurnal EFFECT*. Vol. 3. No. 3. Hal. 3282. Universitas Telkom.
- Kurs Rupiah. (2019). "www.bi.go.id". Diakses tanggal 5 Januari 2019 pk 20.40 WIB.
- Mas'udin. (2017). "Dinamika Perubahan Ekonomi Makro dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas". *Jurnal Perpajak Indonesia*. Vol. 1. No. 1. Hal. 23-37. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Mardiasmo. (2008). "*Perpajakan, Edisi Revisi*". Andi Offset. Yogyakarta.
- M, Imam Syairozi, A. F. (2017). "Analisis Pajak Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Seminar Nasional Sistem Informasi*. 2597-4696. Universitas Merdeka Malang.
- Murni, A. (2006). "*Ekonomika Makro*". PT Refika Aditama. Jakarta.
- Muqodim. (1999). "*Perpajakan Buku Satu (edisi kedua/revisi)*". UII Press dan EKONISIA. Yogyakarta.

- Nuraeni, D. (2011). "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nuryani. (2016). "Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Pasaribu, Benny. (2011). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi di Pasar Modal Indonesia". PT. Indeks. Jakarta.
- Prasetyo, A. dkk. (2007). "Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 2. No. 1. Universitas Brawijaya.
- Pratama, N. dkk. (2016). "Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014)". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8. No. 1. Universitas Brawijaya.
- Pratomo, W. A., (2006). "Teori Ekonomi Makro". Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Putong, Iskandar. (2009). "Economics Pengantar Mikro dan Makro". Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Renata, A. H., dkk. (2016). "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 9. No. 1. Universitas Brawijaya.
- Resmi, Siti. (2009). "Perpajakan : Teori dan Kasus". Salemba Empat. Jakarta.
- Richard, & Arianto, A. T. (2013). "Analisa Korelasi Inflasi, *Economic Growth*, *Economic Structure*, dan *Tax Rate* Terhadap *Tax Revenue* di Negara- Negara ASEAN". *Jurnal Tax & Accounting Review*. Vol. 3 No. 2, 2213.
- Saepudin. (2008). "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara". Universitas Sumatera Utara. *Tesis*.
- Salawati. (2008). "Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Santoso, Singgih. (2002). "SPSS Statistik Parametrik". Gramedia. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). "Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13". Andi Offset. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan, Efendi. (2011). "Metode Penelitian Survei". Pustaka LP3ES. Jakarta.

- Sukirno, Sadono. (2004). *“Makroekonomi Teori Pengantar”*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sukarji, U. (1999). *“Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000: Sebuah analisis Konstruktif”*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukardji, Untung. (2014). *“Pajak Pertambahan Nilai”*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Teori Keynes. (2018) *“www.wisegeek.com/what-is-keynesian-economics.htm”*. Diakses tanggal 21 November 2018 pk 21.00 WIB.
- Tjahyono, Achmad dan Muhammad F, H. (2000). *“Perpajakan (edisi kedua)”*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Waluyo dan Wiryawan B, Ilyas. (2002). *“Perpajakan Indonesia”*. Salemba Empat. Jakarta.
- Warnita, T. dkk. (2015). “Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 9. No. 1. Universitas Bung Hatta.
- Wijayanti, Amalia. (2015). *“Analisis Penerimaan Pajak Indonesia : Pendekatan Ekonomi Makro”*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang.
- Wijayanti, Bambang dan Aristanti, Vidyarningsih. (2007). *“Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi Edisi 1”*. Citra Praya. Bandung.
- Yuliana, Diah. dkk. (2017). “Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang)”. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9 No. 3. STIE Semarang.